



Normalisasi Simpang Tunggu Pembebasan Lahan

Karena Masuk Persil Pribadi

JOGJA - Salah satu solusi kemacetan lalu lintas di Kota Jogja adalah dengan normalisasi simpang. Tapi realisasinya tidak mudah. Karena beberapa simpang masuk dalam lahan pribadi. Pekerjaan harus menunggu

pembebasan lahan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Jogja Umi Akshanti mengaku sudah menerima kajian dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja. Total ada 17 simpang yang direkomendasikan untuk dinormalisasi. Tapi Umi menegaskan belum

bisa merealisasikan permintaan Dishub tersebut. Itu dikarenakan, hampir beberapa simpang di Kota Jogja merupakan persil lahan milik pribadi masyarakat. "Harus dibebaskan dulu lahannya," ujar Umi kemarin (9/12). Untuk urusan pembebasan lahan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja. Dan

dipastikan hingga akhir 2018 belum ada realisasi terkait normalisasi simpang. "Hingga akhir tahun ini belum ada yang simpang yang diprioritaskan untuk dibangun," paparnya.

Terpisah Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kota Jogja Made Golkari Yulianto mengatakan pada 2018 ini sudah mengajukan kajian nor-

malisasi simpang yang ada di Kota Jogja. Setidaknya ada 17 simpang yang sudah diajukan kepada DPUPKP Kota Jogja.

"Normalisasi adalah metode untuk mengurangi antrean kendaraan yang biasa terjadi di beberapa simpang," katanya.

Golkari menjelaskan normalisasi ini dibutuhkan, karena simpang di Kota Jogja dinilai

terlalu siku. Itu menyulitkan kendaraan ketika berbelok. Sehingga cukup menyebabkan antrian kendaraan.

Bentuk normalisasi sendiri, lanjut Golkari adalah menggepras sebagian struktur simpang untuk melebarkan ruang. Itu untuk memudahkan kendaraan untuk berbelok. "Pelebaran simpang ini dilakukan karena untuk jal-

anan Kot asendiri tidak mungkin dilakukan pelebaran," ujarnya.

Sedangkan untuk simpang selama ini menjadi prioritas Dishub Kota Jogja, diungkapkan Golkari ada dua simpang yaitu persimpangan di Jalan Gondomanan dan Brigjen Katamso. "Itu yang membuat kedua daerah tersebut jadi terlihat sangat padat," ujarnya. (cr5/pra/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005